

BAB III
SIKAP NEGARA ANGGOTA UNI EROPA TERHADAP KRISIS MIGRAN
2011-2016

Ageing society dan kebutuhan akan pasokan tenaga kerja merupakan contoh faktor yang mempengaruhi bagaimana Eropa dahulu mulai melakukan dan menerima imigran dari berbagai negara di dunia. Seiring berjalannya waktu semakin banyak jumlah imigran yang terus berdatangan ke Eropa dengan berbagai alasan. Untuk itu Uni Eropa membentuk berbagai regulasi dan kebijakan terkait imigrasi. Disahkannya *visa Schengen* pada 1985 juga memberi pengaruh bagi dunia keimigrasian di Eropa. Lalu Uni Eropa membentuk FRONTEX sebagai upaya kerjasama negara anggota dalam pengamanan perbatasan eksternal agar mobilisasi di Eropa tetap berjalan lancar sekaligus aman.

Ledakan pengungsi pada 2011 membuat Uni Eropa berada dalam situasi krisis karena berbagai kebijakan maupun regulasi imigrasi yang telah dimiliki oleh Uni Eropa ternyata belum mampu menyelesaikan krisis tersebut, hal tersebut juga dikarenakan karena negara anggota Uni Eropa memberi respon yang berbeda mengenai krisis pengungsi yang terjadi.

A. Fenomena Imigrasi Uni Eropa

Jika kita menoleh ke sejarah, masyarakat Eropa telah lama melakukan perpindahan atau bermigrasi yang mana pada awalnya mereka memilih benua lain seperti Amerika atau Australia sebagai tempat tinggal baru dengan harapan akan memiliki kehidupan yang lebih baik (Hansen, 2007). Namun pada saat industri di Eropa semakin maju, masyarakat dari negara lain justru berlomba-lomba untuk memasuki wilayah industri tersebut.

Revolusi industri yang terjadi di Eropa merupakan sebuah fenomena besar yang hingga saat ini menjadi alasan atas pesatnya kemajuan industri negara-negara Eropa. Revolusi industri dimulai pada akhir abad ke-18, di mana terjadinya peralihan dalam penggunaan [tenaga kerja](#) di Inggris yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia kemudian digantikan oleh penggunaan mesin yang berbasis manufaktur. Periode awal dimulai dengan dilakukannya mekanisasi terhadap industri tekstil, pengembangan teknik pembuatan besi dan peningkatan penggunaan batubara. Ekspansi perdagangan turut dikembangkan dengan dibangunnya [terusan](#), perbaikan jalan raya dan rel kereta api (Joseph). Adanya peralihan dari perekonomian yang berbasis pertanian ke perekonomian yang berbasis manufaktur menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk besar-besaran dari desa ke kota, dan pada akhirnya menyebabkan membengkaknya populasi di kota-kota besar di Inggris (Redford, 1976).

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan revolusi industri dapat terjadi di Eropa, yaitu kondisi politik yang cenderung stabil, Inggris yang memiliki kekayaan sumber daya alam seperti bahan-bahan tambang (batu bara, timah, biji besi) serta wol yang kala itu menunjang industri tekstil, adanya penemuan teknologi industri yang dapat meningkatkan hasil produksi, banyaknya modal yang dimiliki oleh Inggris karena majunya pelayaran dan perdagangan, terdapat perlindungan hukum yang diberikan langsung oleh pemerintah terhadap hasil penemuan baru sehingga hal tersebut akan mendorong berlangsungnya penelitian ilmiah, derasnya arus urbanisasi akibat revolusi agraria di pedesaan yang mendorong pemerintah Inggris harus membuka lapangan pekerjaan secara masif (dalam hal ini industri) agar dapat menampung mereka yang datang.

Majunya industri di Inggris menjadi sebuah momentum yang bagus bagi wilayah Eropa yang kemudian mengalami efek domino di bidang industrial dan sejak saat itu pertumbuhan ekonomi di Eropa pun terus mengalami peningkatan demi peningkatan. Dengan adanya kemajuan ini, hal tersebut dilihat sebagai daya tarik bagi masyarakat di wilayah luar Eropa untuk kemudian tertarik untuk bermigrasi dan hidup di Eropa demi kehidupan yang lebih layak dengan segala potensi yang dimiliki oleh Eropa yang mana tidak dimiliki oleh wilayah lain pada masa itu.

Sejak industri di Eropa mengalami peningkatan yang signifikan, terhitung paska 1945 terdapat banyak jenis imigran yang mulai berdatangan di Eropa, salah satunya imigran tenaga kerja yang mencari pekerjaan, imigran karena perang seperti yang dilakukan masyarakat Indochina, hingga imigran yang datang karena

berkeluarga. Selain itu Hansen menambahkan satu jenis imigran yang masuk ke Eropa paska 1945 adalah imigran pencari suaka, imigran tersebut mulai banyak berdatangan ke wilayah Eropa dimulai pada tahun 1990 hingga sekarang. Pencari suaka (asylum seeker) ialah mereka yang melakukan migrasi dari negara asalnya ke negara lain dengan harapan akan mendapat perlindungan secara hukum di negara yang menjadi tujuannya. Alasan yang mendasari seseorang mencari suaka ke negara lain bermacam-macam, misalnya karena ia merasa tidak cocok dengan pemerintahan di negara asalnya (hansen, 2007).

Pada awalnya, kehadiran para migran ke Eropa memberi keuntungan bagi negara-negara Eropa itu sendiri karena banyaknya migran yang masuk sedikit banyak membantu memulihkan isu demografi yang sempat terjadi di Eropa yang mana hal tersebut menyebabkan Eropa kekurangan tenaga kerja. Isu demografi yang melanda Eropa tersebut merupakan sebuah isu yang hingga kini masih menjadi perhatian para petinggi Eropa. Munculnya isu demografi tersebut jika tidak diselesaikan dengan tepat maka akan mempengaruhi berbagai sektor khususnya sektor ekonomi.

Munculnya isu demografi tersebut ditandai dengan jumlah penduduk di usia produktif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tua. Pada tahun 2010, jumlah penduduk di usia muda (0 – 14 tahun) memberi kontribusi sebanyak 15,6% dari keseluruhan jumlah populasi di 28 negara anggota Uni Eropa, jumlah penduduk di usia kerja (15 – 64 tahun) berkontribusi 67%, dan jumlah penduduk usia tua (65 tahun ke atas) berkontribusi 17,4% dari keseluruhan jumlah penduduk di Uni Eropa. Dari data statistik yang dikeluarkan oleh European Commission, dalam dua

dekade terakhir, peningkatan jumlah penduduk di usia kerja hanya mencapai 0,3 % sedangkan peningkatan jumlah penduduk usia tua mencapai 3,7 % dan hal inilah yang menyebabkan semakin rendahnya tenaga kerja di Uni Eropa (european commission , 2011).

Masalah penuaan (ageing society) yang terjadi di Uni Eropa ini tentu mempengaruhi berbagai aspek kehidupan didalam maupun diluar Uni Eropa , melihat bagaimana dunia yang semakin global dan menimbulkan interkoneksi antar wilayah, negara, bahkan antara satu orang dengan yang lain. Dampak pertama dari menurunnya penduduk usia kerja adalah penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi. Uni Eropa akan kekurangan jumlah pekerja atau buruh, padahal para buruh tersebut sangat berperan dalam pembangunan ekonomi Uni Eropa . Seperti yang diketahui bahwa pertumbuhan penduduk menyumbang antara satu setengah hingga dua pertiga dari kenaikan PDB.

Dengan adanya permasalahan kependudukan atau yang lebih dikenal dengan ageing society ini, diperkirakan tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan pada GDP negara-negara anggota UE akan turun dari 2,4% ke 1,2% antara tahun 2030 dan tahun 2050(Gumus, 2010), yang mana hal tersebut tentu menjadi sebuah urgensi yang harus diselesaikan oleh Uni Eropa demi menyelamatkan perekonomiannya bukan hanya di negara-negara anggota saja namun juga di tingkat regionalisme Uni Eropa secara keseluruhan.

Komisi Uni Eropa kemudian mengeluarkan serangkaian kebijakan sebagai respon terhadap isu demografi tersebut, salah satu kebijakan terkait isu tersebut adalah menerima dan mengintegrasikan imigran ke Eropa. Dengan diberlakukannya kebijakan ini, maka Uni Eropa membuka gerbang bagi masuknya para imigran yang ingin tinggal dan hidup di Eropa dengan berbagai latarbelakang alasan, khususnya bagi mereka yang ingin bekerja di Eropa.

Memasuki tahun 2011, Uni Eropa dihadapkan dengan gelombang migran yang jumlahnya mencapai satu juta jiwa pada tahun 2015. Hal tersebut kemudian dianggap sebagai krisis pengungsi Eropa. Pengungsi yang datang berasal dari berbagai belahan dunia seperti Timur Tengah, hingga Afrika. Puncak krisis tersebut ditandai dengan banyaknya pengungsi yang terlantar diberbagai perbatasan negara-negara Eropa. Pengungsi datang melalui berbagai cara dan melewati jalur yang berbeda-beda namun terjadi arus perjalanan pengungsi yang signifikan di Laut Mediterania yang menjadi jalur utama pengungsi masuk ke Uni Eropa .



Gambar 1. Peta Jalur Kedatangan Pengungsi (sumber: The Independent: Lizzie Dierden 2015)

B. Perbedaan Persepsi Antar Petinggi Eropa Terkait Krisis Migran dan Keberlangsungan Integrasi Uni Eropa

Adanya aturan visa *Schengen* membuat Uni Eropa memberi kebebasan bagi masyarakat Eropa untuk melakukan perjalanan dari satu negara Eropa ke negara Eropa lainnya hanya dengan menggunakan satu visa. Pemberlakuan visa *Schengen* yang ditetapkan oleh Uni Eropa pada tahun 1985 ini telah lama menunjang free movement di Eropa dengan tujuan untuk memberikan kemudahan mobilisasi bagi masyarakat Uni Eropa. *Schengen* area ini juga mendukung keberlangsungan sistem common market yang bertujuan untuk

memberikan kemudahan mobilisasi barang dan jasa di Eropa sehingga tujuan awal diusulkannya common market yaitu mengintegrasikan ekonomi negara anggota dapat berjalan lebih efisien.

Dengan diberlakukannya sistem visa tunggal tersebut, mobilisasi di Eropa menjadi mudah dan lebih efisien karena tidak adanya pemeriksaan yang harus dilakukan di perbatasan negara-negara Eropa apabila kita sedang melakukan perjalanan dari satu negara Eropa ke negara Eropa lainnya yang menerapkan aturan visa *Schengen* tersebut (atau disebut dengan schengen area).

Namun seperti layaknya sebuah hukum sebab-akibat, pemberlakuan visa *Schengen* inipun tidak hanya memberi keuntungan bagi masyarakat Uni Eropa , namun aturan visa *Schengen* ini juga memberi implikasi terhadap besarnya arus imigran yang masuk ke Uni Eropa . Tidak adanya kontrol perbatasan di negara-negara Eropa kemudian membuat para pendatang dapat dengan mudah keluar-masuk Uni Eropa . Hal ini tentu saja mempengaruhi jumlah imigran yang datang dan dari tahun ketahun jumlahnya semakin bertambah.

Kontrol perbatasan akhirnya diberlakukan oleh Uni Eropa sebagai bentuk respon dari meningkatnya jumlah imigran yang datang ke Uni Eropa serta untuk mencegah terjadinya ledakan pengungsi di Eropa. Salah satunya

yaitu dengan dibentuknya kerjasama kontrol perbatasan eksternal yang dilakukan oleh negara-negara Uni Eropa dan didirikan dibawah pilar perjanjian kerjasama *justice and home affairs* (JHA) yang kemudian dikenal dengan FRONTEX. FRONTEX didirikan oleh Uni Eropa pada tahun 2004 sebagai kontrol perbatasan agar keamanan regional Uni Eropa dapat tetap terjaga berdampingan dengan berjalannya aturan visa *Schengen* di Eropa.

Adanya aturan visa *Schengen* yang telah lama menjadi suatu keistimewaan Uni Eropa kemudian diragukan keberadaannya ketika Uni Eropa dihadapkan dengan ledakan imigran yang terjadi sepanjang tahun 2011 hingga tahun 2016. Ketika krisis migran terjadi Uni Eropa sebagai badan integrasi tidak mampu memberi respon yang terkoordinasi terkait dengan solusi dari krisis tersebut. akibatnya negara-negara anggota Uni Eropa memilih untuk bertindak secara sepihak dengan mengeluarkan kebijakannya masing-masing. Bahkan sebagian negara-negara di Eropa bagian timur secara terang-terangan menolak untuk menampung imigran yang datang dengan membangun pagar di perbatasan negaranya.

Hal inilah yang kemudian menjadi isu tersendiri bagi masyarakat Eropa maupun petinggi-petinggi Eropa. Jika banyak negara yang menutup perbatasannya lalu bagaimana keberlangsungan eksistensi dari aturan visa *Schengen* yang dibuat dengan tujuan memberi kemudahan mobilisasi bagi masyarakat Uni Eropa untuk melakukan lintas perbatasan. Pemberlakuan

kontrol perbatasan yang dapat dikatakan ekstrem tersebut kemudian diperdebatkan oleh para petinggi di Uni Eropa, seperti yang dikatakan oleh Martin Hufner yang merupakan seorang *chief economist*; "seseorang tidak perlu terlalu cepat menarik kesimpulan. Memang benar bahwa integrasi Eropa sedang berisiko. Perjanjian *Schengen* yang mengatur kebebasan di perbatasan diantaranegara mitra yang sejatinya sangat membantu kini dalam bahaya. Hal ini juga memungkinkan ada efek negatif pada Euro.

Namun bila Eropa bersatu dan optimis menghadapi krisis migran tersebut, keadaan juga dapat berbeda. Mungkin dengan adanya tantangan pengungsi di Eropa ini kemudian Uni Eropa akan mendapatkan dorongan agar membawa Uni Eropa menjadi lebih terintegrasi" (Is European Integration in Trouble?, 2015). Melihat pemaparan salah satu tokoh Uni Eropa tersebut, terlihat bahwa masih ada pihak-pihak yang optimis bahwa Uni Eropa mampu menghadapi krisis ini apabila Uni Eropa dapat membangun kerjasama yang efektif.

Berbeda dengan Martin Hufner, petinggi Eropa lainnya yaitu Gustav A. Horn yang merupakan seorang *research director*, memiliki pendapat lain, ia memberi kutipan yang berbunyi "*on integration, europe is at a crossroad*". Ia pun menjelaskan bahwa arus besar pengungsi yang datang melalui Balkan merupakan tantangan logistik yang luar biasa untuk setiap negara di sepanjang jalan yang mereka lewati. Dalam menyikapi hal ini, Hungaria, Kroasia dan

Slovenia, menutup perbatasannya dengan mendirikan pagar. Semakin deras arus pengungsi yang datang, maka semakin banyak pula negara Eropa yang memperkuat perbatasannya.

Jika hal ini terus berlangsung, maka keistimewaan Eropa yaitu kebebasan di perbatasan (aturan visa Schengen) hanya akan menjadi masa lalu. Namun masih ada alasan yang lebih serius yaitu masuknya pengungsi telah menunjukkan bahwa negara-negara anggota Uni Eropa tidak harus berbagi nilai-nilai yang sama. Terbukti dengan banyaknya negara Eropa Timur yang terus terang menolak pengungsi, terutama karena alasan perbedaan budaya dan agama.

Kemudian muncul pertanyaan dari perilaku ini, yaitu apakah Eropa harus menjadi wilayah homogen budaya atau wilayah yang beragam. Perpecahan yang terjadi akibat krisis migran tersebut tidak hanya terjadi diantara negara-negara yang berbeda, tetapi juga di dalam satu negara. Perbedaan sikap terhadap para pengungsi antara Barat dan beberapa bagian di Jerman Timur adalah salah satu contohnya.

Keberadaan partai politik yang menentang imigrasi pun juga meningkat pada tahun 2015 di Eropa. Partai-partai tersebut cenderung ingin Uni Eropa kembali lebih mengutamakan pengambilan keputusan nasional yang mana hal ini tentu akan melemahkan integrasi Uni Eropa . Horn

mengumpamakan Eropa sedang menuju persimpangan jalan, dimana Uni Eropa harus membuat keputusan mendasar: baik bergerak ke arah yang lebih terintegrasi, atau kembali ke nasionalisme (Is European Integration in Trouble?, 2015).

Berdasarkan pemaparan dari Horn, tergambar bagaimana ia melihat krisis ini cenderung sebagai kerugian daripada sebagai peluang. Horn melihat krisis ini telah membawa Uni Eropa ke persimpangan jalan yang mana mendesak Uni Eropa untuk harus memilih ke arah mana Uni Eropa akan dibawa.

Selain aturan visa *Schengen*, Uni Eropa juga memiliki sebuah Traktat Lisbon yang berisi prinsip solidaritas dan distribusi tanggungjawab yang adil diantara negara-negara anggota yang mana dapat mengatur kebijakan-kebijakan terkait kontrol perbatasan, suaka, dan imigrasi. Prinsip yang tertera pada traktat lisbon ini merupakan sebuah konsekuensi yang harus dihadapi oleh Uni Eropa karena memberlakukan visa *Schengen* yang kemudian membentuk free movement bagi setiap individu di Uni Eropa .

Menghapus perbatasan internal berarti memerlukan penguatan di perbatasan eksternal yang harus dibangun oleh solidaritas dan distribusi tanggungjawab yang adil diantara negara-negara anggota Uni Eropa . Adanya pendekatan bersama seperti hal tersebut menjadi penting ketika kita

menyadari bahwa adanya satu celah akan menyebabkan hal tersebut menjadi tidak efektif.

Selain perdebatan mengenai eksistensi visa *Schengen*, dan urgensi yang timbul dari traktat lisbon, kebijakan imigrasi Uni Eropa lain yang juga diperdebatkan keefektifannya ialah Dublin Regulation. Dalam dublin regulation, Uni Eropa telah mengatur bagaimana mekanisme penerimaan imigran di setiap negara-negara Uni Eropa . Dalam regulasinya juga dijelaskan bahwa negara yang kali pertama didatangi oleh imigran adalah negara yang bertanggung jawab untuk memberikan asylum kepada mereka yang mengajukan permohonan suaka. Namun pada praktiknya banyak negara-negara Uni Eropa yang menolak mengurus aplikasi suaka karena berbagai alasan. Salah satunya yaitu karena negara tersebut merasa aturan dari *Dublin regulation* ini tidak adil dan memberi beban yang besar bagi negara- negara yang letak geografisnya berada di titik-titik kedatangan pengungsi.

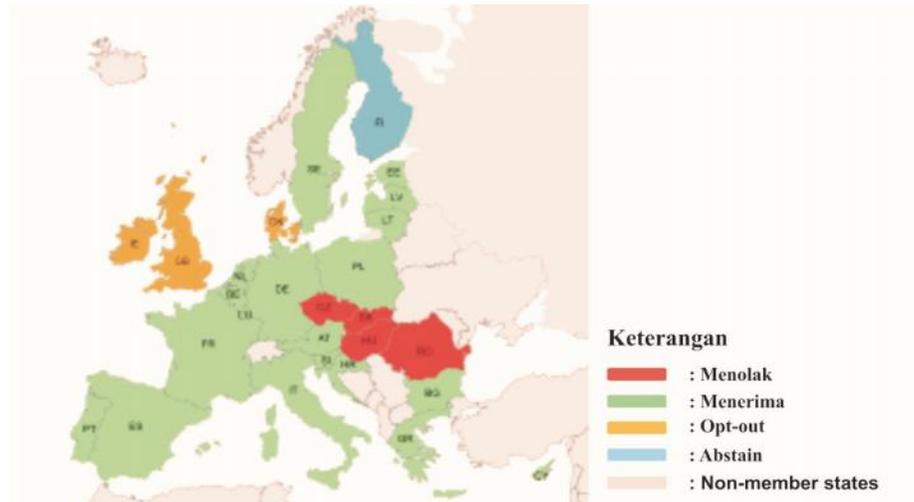
Untuk itu, tidak sedikit negara-negara anggota Uni Eropa yang menginginkan pemerintah Uni Eropa mempertimbangkan dan menyusun kembali kebijakan-kebijakan terkait imigrasi Uni Eropa agar tidak memberatkan pihak tertentu saja.

C. Respon Negara Anggota Terhadap Krisis Migran

Memasuki tahun 2011 hingga tahun 2016 isu migrasi di Uni Eropa menjadi sebuah krisis ditandai dengan jumlah 220 juta jiwa imigran pertahun yang berdatangan ke Eropa dan mengajukan suaka. Kedatangan para imigran tersebut bukan hanya sebagai tenaga kerja atau buruh seperti yang selama ini telah terjadi di Eropa, namun kali ini para imigran tersebut datang secara masif dan dengan berbagai latarbelakang alasan. Hal ini bukan hal yang biasa dihadapi oleh Uni Eropa , oleh karena itu kemudian timbul kekisruhan yang terjadi diantara negara-negara anggota Uni Eropa . Hal ini terjadi karena adanya pertentangan diantara mereka dalam menyikapi gelombang imigran tersebut.

Pertentangan tersebut terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh komisi Eropa pada September 2015 berupa pemberlakuan kuota pengungsi yang dikeluarkan namun belum sepenuhnya dapat diimplementasikan, ditambah dengan gagalnya *Dublin regulation* yang pada awalnya diberlakukan untuk negara yang pertama kali menerima imigran di Uni Eropa yang ternyata dinilai memberatkan negara-negara tersebut, serta terkait dengan beberapa penolakan oleh negara anggota seperti Hungaria dan Republik Ceko yang disebabkan oleh berbagai hal.

Berikut adalah peta negara-negara Uni Eropa yang memperlihatkan negara mana saja yang turut serta membantu menerima imigran dan negara mana saja yang menolak kehadiran imigran;



Gambar 2. Peta Negara Uni Eropa ¹

1. Republik Ceko

Para pemimpin dari Kelompok Visegrád (Republik Ceko, Hungaria, Polandia, Slovakia) menyatakan bahwa mereka tidak akan menerima kebijakan kuota imigran yang diusulkan oleh komisi eropa dalam jangka panjang, yang dikatakan dalam pertemuan yang digelar di Praha. Sekretaris Pemerintah Republik Ceko berkomentar bahwa pengungsi itu sendiri yang tidak ingin tinggal dan menetap di negaranya karena beberapa kali ditemukan para pengungsi tersebut ingin mencoba melarikan diri. Menurutnya sistem kuota ini tidak adil untuk para pengungsi, karena hanya akan memperlakukan

¹Keterangan Gambar :

Negara Menolak; Hungaria, Slovakia, Republik Ceko, Croasia

Negara Menerima; Jerman, Perancis, Inggris, Belgia, Belanda, Italia, Lituania, Latvia Spanyol, Swedia, Portugis, Bulgaria, Yunani.

Negara Abstain; Finlandia

Negara Opt-Out; Irlandia

pengungsi seperti ternak yang bisa dipindahkan begitu saja (european refugee crisis: a systematic violation of human rights , 2015).

Menurut Menteri Dalam Negeri Ceko yaitu Milan Chovanec, sejak September 2015, Republik Ceko telah menawarkan suaka kepada setiap pengungsi Suriah yang tertangkap oleh polisi dengan mengabaikan Regulasi Dublin, hasilnya dari sekitar 1.300 pengungsi yang ditangkap sampai tanggal 9 September, hanya 60 orang saja yang memutuskan untuk mengajukan permohonan suaka di Republik Ceko, sisanya sebanyak 38 orang kemudian melanjutkan perjalanannya ke Jerman atau ke negara lain (a plan for europe's refugees: how to manage the migrant crisis , 2016).

Pada bulan November 2015, Republik Ceko memulai program evakuasi medis pengungsi Suriah yang dipilih dari Yordania. Dalam program ini, anak-anak yang sakit dipilih untuk menjalani perawatan medis di Praha dengan fasilitas yang baik, dan keluarga mereka mendapatkan suaka, jaminan transportasi dan biaya flat dibayar oleh pemerintah Ceko setelah menyatakan maksud yang jelas untuk tinggal di negara ini. Namun, meskipun sudah diperlakukan dengan baik, masih terdapat pula keluarga yang melarikan diri ke Jerman. Perdana Menteri Ceko Bohuslav Sobotka menyatakan bahwa ini adalah pertanda bahwa sistem kuota wajib tidak akan berhasil karena melihat bagaimana para pengungsi atau imigran yang datang memiliki tujuannya masing-masing(european refugee crisis: a systematic violation of human rights , 2015).

2. Hungaria

Diskriminasi ras merupakan satu hal yang kerap menjadi isu hangat di berbagai negara. Diskriminasi yang dapat dilakukan oleh sekelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain (biasanya kelompok minoritas) dapat terbagi kedalam beberapa jenis, salah satunya yaitu diskriminasi yang dilakukan berdasarkan xenophobia. Xenophobia itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *xenos* yang berarti orang asing dan *phobos* yang berarti ketakutan. Xenofobia diartikan sebagai sebuah kebencian atau ketakutan terhadap orang asing atau terhadap politik atau budaya dari orang-orang asing. Xenofobia ini bisa muncul di dalam hubungan atau persepsi di dalam *ingroup* atau *outgroup*, antara lain berupa kecurigaan terhadap kegiatan-kegiatan orang-orang asing yang dibencinya, agresi, dan dapat sampai kepada keinginan untuk menghancurkan keberadaan orang-orang asing tersebut agar bisa merasa meraih kemurniannya kembali.

Xenofobia dan berbagai prasangka negatif dipadu oleh rasa takut secara sosial kemudian dimengerti sebagai fenomena, terutama di Hungaria, dimana masyarakatnya hanya memiliki sedikit pengalaman mengenai imigrasi. Kehadiran para imigran dengan berbagai latarbelakang budaya dan norma sosial yang mereka miliki merupakan sebuah ancaman bagi mereka

yang merasakan xenophobia tersebut (TARKI social research and institute , 2016).

Mengenai hal ini, masyarakat tidak dapat disalahkan karena hal terkait dengan imigrasi telah dikembangkan sebagai hal yang negatif di ranah sosial masyarakat. Yang bertanggung jawab mengenai masalah keimigrasian ini adalah pihak politisi yang kerap kali mengeksploitasi situasi seperti ini. Berdasarkan data jangka pendek, menurut laporan penelitian yang dilakukan oleh lembaga polling Hungaria, tingkat xenophobia di Hungaria telah menurun secara signifikan sejak musim semi tahun di 2015.

Sementara dalam survei mengenai xenophobia yang dilakukan pada bulan April, mereka berada di 46 persen. pada bulan Juli menurun menjadi 39 %, dan pada bulan Oktober terjadi penurunan ke 36 %. preferensi partai juga memainkan peran penting mengenai bagaimana fenomena xenophobia berlangsung dan xenophile bersikap (hungary, xenophobia and feeding the fears of terrorism , 2016).

Masyarakat yang merasakan xenophobia ini menilai bahwa imigran muslim memiliki adat dan budaya yang bertolak belakang dengan budaya penduduk Eropa. Selain itu, terdapat kekhawatiran akan meningkatnya penganut agama Islam di Eropa. Meski faktanya penduduk mereka berkurang, dan akan terus berkurang, Hungaria dan Slovakia dengan tegas

menolak pengungsi yang tidak menggunakan Alkitab sebagai kitab suci mereka.

Hungaria memandang pengungsi beragama muslim sebagai ancaman bagi negara mereka yang didominasi oleh agama Kristen, meski diprediksi pada tahun 2030 populasi Hungaria akan menyusut 5,8% dari populasi sekarang. Negara tersebut termasuk ke dalam salah satu negara dengan penyusutan tercepat di Eropa Timur tanpa adanya pengungsi (TARKI social research and institute , 2016).

3. Slovakia

“due to the fact that migration will objectively affect our future, we must affect migration.” (Migration Policy of the Slovak Republic: perspective until the year 2020 , 2011) melihat sepenggal kutipan diatas, sedikit banyak telah menggambarkan bagaimana sikap Slovakia terhadap kehadiran imigran di negaranya maupun di Uni Eropa . Slovakia memandang bahwa pengungsi yang datang ke negaranya merupakan sebuah beban bagi keberlangsungan hidup negaranya. Xenophobia yang dirasakan oleh slovakia memiliki tensi yang cukup tinggi dalam ranah agama yaitu agama islam. Pemerintah slovakia dengan tegas mengatakan bahwa mereka menolak kehadiran kaum muslim di negaranya.

Hal tersebut membuat komisi Eropa harus menindak tegas penolakan yang dilakukan oleh pemerintah slovakia, komisi serta petinggi Uni Eropa lainnya menilai bahwa Slovakia dalam hal ini sudah melampaui batas. Uni Eropa menginginkan negara anggotanya dapat berkontribusi dan menunjukkan solidaritasnya dalam menangani kasus ini bersama-sama agar kebijakan yang telah disusun oleh Uni Eropa dapat diberlakukan dengan cepat, tepat, dan efektif.

Negara-negara di Eropa Timur yang menolak kedatangan para imigran menganggap bahwa pemberlakuan kuota wajib yang ditetapkan oleh komisi Eropa bukanlah sebuah solusi efektif namun justru akan semakin mendorong imigran untuk terus berdatangan ke Eropa.

Berbeda dengan Eropa Timur yang cenderung menolak keberadaan imigran, negara-negara di Eropa Barat justru membuka pintu masuk bagi datangnya para imigran. Jerman, Perancis, dan Inggris ialah beberapa contoh negara Eropa yang memiliki komitmen untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dengan menerima para imigran yang datang. Bahkan negara-negara tersebut juga melakukan penguatan militer demi mencegah terjadinya perdagangan manusia yang marak terjadi sebagaimana derasnya gelombang imigran yang datang.

4. Jerman

Pada tahun 1990 dengan peristiwa runtuhnya tembok Berlin yang sekian lama telah memisahkan Jerman Barat dengan Jerman Timur menjadi pertanda bahwa Jerman membuka dirinya terhadap dunia. Sejak saat itu pula Jerman banyak menerima imigran ke negaranya. Bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur juga membuat arus imigrasi di Jerman meningkat (S, Silvy, & Sudirman, 2010).

Ketenagakerjaan merupakan sektor yang fundamental bagi perekonomian Jerman. Kuatnya perekonomian di Jerman merupakan bukti baiknya pengelolaan tenaga kerja di Jerman. Banyaknya pengungsi yang memasuki Jerman dipandang Jerman sebagai sebuah potensi yang baik bagi perekonomian negaranya. Banyaknya imigran berbanding lurus dengan potensi tenaga kerja yang tersedia bagi Jerman. Dengan besarnya jumlah tenaga kerja yang dapat dimiliki, dapat membantu mendorong perekonomian Jerman ke tingkat yang lebih tinggi.

Dalam menghadapi krisis pengungsi yang terjadi, Jerman cenderung menerima pengungsi dengan mengesampingkan Regulasi Dublin, mempercepat proses penerimaan suaka dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, serta mewajibkan seluruh negara bagian untuk menerima kuota pengungsi yang ditentukan pemerintah federal berdasarkan kepadatan penduduk.

Kebijakan Jerman untuk menerima pengungsi yang masuk ke wilayah negaranya ini menimbulkan dampak tersendiri bagi keamanan regional di Eropa, baik itu positif maupun negatif. Kebijakan Jerman yang ini membuat banyak pengungsi dari negara-negara konflik turut serta menjadikan Jerman sebagai negara tujuan utamanya. Hal ini mengakibatkan semakin banyaknya pengungsi yang masuk ke wilayah negara-negara Eropa hanya untuk masuk ke negara-negara yang bersahabat dengan pengungsi dan hal ini kemudian memicu kehadiran pengungsi di wilayah Eropa lainnya.

Namun Angela Merkel sebagai kanselir Jerman bersikap tegas untuk terus membuka negaranya terhadap para pengungsi yang datang. Jerman tegas dengan posisinya karena Jerman melihat krisis pengungsi yang terjadi bukan hanya krisis bagi Eropa namun sudah menjadi krisis kemanusiaan yang seharusnya menjadi perhatian seluruh masyarakat internasional. Nilai-nilai kemanusiaan harus selalu dijaga dengan membantu para pengungsi dan memperlakukan mereka dengan manusiawi serta memberikan apa yang memang menjadi hak asasi mereka.

5. Inggris

Sejak tahun 1980-an Inggris telah menjadi negara imigran. Sejak saat itu pula perekonomian Inggris mengalami perkembangan yang pesat. Diperkirakan hingga tahun 2017 pengungsi yang telah hidup di Inggris

mencapai 117.234 jiwa, angka tersebut setara dengan 0,18 persen dari total populasi penduduk Inggris yaitu 64,1 juta jiwa (Refugee fact and figures , 2017).

Pada tahun 2004 Inggris banyak kedatangan imigran khususnya dari negara Eropa bagian timur. Dalam menghadapi krisis migran yang terjadi mulai tahun 2011, David Cameron sebagai perdana menteri Inggris mengatakan bahwa Inggris akan membuka pintu bagi para pengungsi yang datang ke negaranya. Cameron menegaskan bahwa Inggris akan menerima 20.000 pengungsi selama lima tahun kedepan (yaitu 2015-2020). Meskipun jumlah tersebut tidak sebanyak beban pengungsi yang diterima oleh Jerman yang menargetkan akan menerima 800.000 pengungsi, namun bagi Inggris hal ini merupakan satu kebijakan yang memungkinkan untuk dilaksanakan dan dinilai paling efektif.

Selain itu, pemerintah Inggris juga memberikan berbagai bentuk bantuan kepada para pengungsi yang akan tinggal di Inggris, bantuan tersebut akan diberikan selama 12 bulan dan bantuan tersebut berupa sekolah lokal bagi anak-anak usia sekolah, layanan perbankan, *job centre*, dan pelatihan bahasa Inggris (britain's response to the migration challenge , 2015).

Namun dibalik semua bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah Inggris kepada para pengungsi, hal tersebut dinilai belum cukup oleh masyarakat Inggris. Terbukti dengan dilakukannya demonstrasi di beberapa

titik di Inggris yang dilakukan oleh berbagai kalangan dari masyarakat Inggris sebagai protes kepada pemerintah Inggris atas kebijakannya terkait penanganan pengungsi. Masyarakat Inggris menilai bahwa kebijakan tersebut dirasa menciderai nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya dijaga dengan baik oleh pemerintah Inggris. Mereka pun menilai bahwa para pengungsi berhak mendapatkan tempat yang layak dan bantuan yang lebih.

6. Perancis

Secara geografis letak Perancis berada tepat di perbatasan antara Laut Mediterania dan Italia, oleh karena itulah sejak tahun 1999 Perancis kerap menjadi negara tujuan para imigran. Pada saat Perancis dibawah pemerintahan Presiden Nicolas Sarkozy, ia memperketat regulasi mengenai imigrasi untuk menahan laju imigrasi yang terus meningkat. Salah satunya yaitu dengan memilih imigran tertentu saja yang diperbolehkan masuk dan tinggal di Perancis, imigran terpilih tersebut ialah imigran yang berstatus high qualification, kebijakan tersebut terangkum dalam France Immigration and Integration Law.

Kebijakan ini memiliki tiga poin utama yaitu; penyeleksian imigran, integrasi mandatar, dan pembangunan. Selain kebijakan tersebut, kehadiran Union For a Popular Movement sebagai partai politik di Perancis juga

mempengaruhi bagaimana pemerintah perancis membentuk kebijakan imigrasinya (Dublet, 2014).

Pada tahun 2011 hingga tahun 2016, selama Uni Eropa dihadapkan dengan gelombang imigran yang menjadi krisis, 70.000 orang telah mengajukan permohonan suaka kepada perancis (we have enough to deal with at home! france and the refugee crisis , 2016).

Francois Hollande, presiden Perancis yang mulai memimpin pemerintahan Perancis di tahun 2012, mengatakan bahwa Perancis akan menerima pengungsi lebih kurang sebanyak 24.000 jiwa hingga tahun 2015. Meskipun pada November 2015 terjadi penyerangan di Perancis yang diduga dilakukan oleh kelompok ekstrimis, hal tersebut tidak merubah pendirian Perancis untuk terus membantu para pengungsi yang datang. Meskipun jumlah pengungsi yang mampu ditampung oleh Perancis belum mencapai jumlah minimal kuota yang telah ditetapkan oleh komisi Eropa, namun sikap Perancis terhadap para imigran ini cukup toleran (we have enough to deal with at home! france and the refugee crisis , 2016).

Jerman, Inggris, dan Perancis merupakan negara-negara anggota Uni Eropa yang banyak menerima pengungsi di negaranya masing-masing. Angela Merkel selaku kanselir jerman telah membuktikan bahwa Eropa sangat menjunjung tinggi nilai-nilai HAM yang mana ditunjukkan melalui

kebijakannya dalam menerima pengungsi dalam jumlah besar selama krisis terjadi.